**MAKALAH**



**PENDEKATAN NEGARA DALAM STUDI EKONOMI POLITIK**

**POKOK-POKOK PIKIRAN DISAMPAIKAN PADA DISKUSI BULANAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTEDR DAN PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS NASIONAL PADA 22 JUNI 2024, DI KAMPUS MENARA UNAS RAGUNAN JAKARTA SELATAN**

**Dr. Asran Jalal, Drs, M.Si**

**NIDN: 0328106101**

**UNIVERSITAS NASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK**

**2024**

1. **Latar Belakang Masalah**

Ilmuwan memilah pendekatan atau teori dalam studi ekonomi politik. Bentuk pemilahan tersebut antara lain adalah apa yang disebut teori yang berpusat pada negara (*state centred approach*) dan teori yang berbasis pada masyarakat (*Society centred approaches)* (Grindle, 1989).*,* teori ekonomi politik pendekatan struktural (*structural approach*) dan teori kultural (*cultural approach*) (Aziz S.R, 2014), dan ada yang memilah yang lebih rinci (Caporaso, & Levine 1992; 31). Prinsipnya pendekatan berpusat pada masyarakat dan pendekatan berpusat pada negara dapat digunakan secara bersamaan.

Connolly (1969) menjelaskan beberapa ciri pokokk teori ekonomi politik yang berpusat pada masyarakat yaitu: (1) negara adalah arena pertarungan dan sekaligus menjadi wasit; (2) negara sebuag tempat dimana konflik masyarakat dijalankan dan sekaligus beberapa aturan yang mengatur jalannya konflik; (3) fungsi negara pihak yang meimplementasikan kebijakan, setelah kelompok masyarakat menyampaikan tuntutan mereka; (4) stabilitas masyarakat terbentuk ketika hasil keputusan politik mencerminkan keseimbangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Caporaso, & Levine. (1992) mengemukakan ciri pendekatan berpusat pada masyarakat (*sosiety centered approach*) atau aliran pluralism, pada umunya memandang negara memiliki peran sebagai fasilitator semata. Fungsi negara: (1) melakukan mediasi dan koordinasi terhadap tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai kelompok; (2) mendorong pihak yang bertentangan untuk mengambil kompromi dan; (3) menjamin semua aturan dipatuhi oleh semua pihak. (4) negara berperan bersifat sekunder; (4). negara sebagai instrumen atau institusi yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing; (5) negara bukanlah pelaku yang aktif, melainkan sekedar berfungsi sebagai instrument bagi keinginan atau kepentingan individu atau kelas. Penjelasan tersebut memberikan pemahman bahwa pendekatan yang berpusat pada masyarakat, fokus analisisnya adalah masyarakat atau kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepentingan ekonomi.

Teori ekonomi politik berpusat pada masyarakat, juga terdapat teori ekonomi politik pendekatan negara. Pendekatan ini sudah dikemukakan para ilmuwan politik dan bahkan studi-studi di Indonesia sudah menggunakan pendekatan ini. Bahagian ini menjelaskan beberapa teori-teori ekonomi politik pendekatan berpusat pada negara. Topik pembahasan mencakup dasar pemikiran teori ekonomi politik pendekatan negara dalam studi ekonomi politik, teori-teori ekonomi politik yang berpusat pada negara, hasil studi ekonomi politik yang berpusat pada negara khususnya di Indonesia, terakhir ulasan penutup berupa arah masa depan teori ekonomi politik berpusat pada negara.

1. **Pendekatan Negara**

Beberapa aspek terkait dengan teori ekonomi politik berpusat pada negara yaitu pertama kedudukan teori. Teori-teori ekonomi berpusat pada negara merupakan teori-teori ilmu politik. Kedua, negara dimaksud adalah semua individu yang memegang jabatan (elite politik) yang memiliki otoritas merumuskan dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat masyarakat. Ketiga, muncul pendekatan berpusat pada negara, karena teori berpusat pada masyarakat (puluralis/liberal), kurang memberikan perhatian pada pendekatan berpusat pada negara. Ketika terjadi resesi ekonomi di Amerika dan Eropa pasca prang Dunia ke II, teori pendekatan pada masyarakat tidak dapat memberikan penjelasan dan prediksi tentang fenomena tersebut. Faktanya negara mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi pembangunan ekonomi.

Dasar pemikiran teori ekonomi berpusat pada negara yaitu: (1) negara adalah institusi yang kuat; (2) negara bersifat otonom terhadap masyarakat; (3) negara mempunyai kepentingan dan aspirasinya sendiri yang bisa berbeda dengan kepentingan masyarakat. (Caporaso & Levine, 1992; Rauf, 1996). Mengapa negara disebut institusi yang kuat, karena negara memiliki legitimasi dari rakyat untuk menlaksanakan kekuasaan negara. Negara memiliki sarana kekuasaan seperti pengadilan, militer, dan polisi untuk menegakkan kekuasaannya. Negara bersifat otonom pada masyarakat, maksusnya negara dalam membuat keputusan tidak harus sejalan dengan kehendak masyarakat, negara tidak bisa didikte oleh masyarakat. Negara memiliki kepentingan dan aspirasinya sendiri, bisa kepentingan negara, kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadinya.Kepentingan negara bisa sama atau berbeda dengan kepentingan negara, bila kepentingan negara dan kepentingan masyarakat tidak sejalan bisa timbul konflik dan kompromi antara negara dan masyarakat.

O,Donnell (1973; 76-83) teorinya tentang negara otoriter birokratik (*Bureaucratic Authoritarian State).* Negara menjadi otoriter artinya negara memaksakan kehendaknya pada masyarakat. Cirinya: (1) pemerintah dipegang oleh militer sebagai lembaga berkolaborasi dengan teknokrat sipil;(2) didukung enterpreneur oligopolistik bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional; (3) pengambilan keputusan bersifat birokratik-teknokratik tanpa melibatkan proses *bargaining* dengan berbagai kelompok masyarakat (pendekatan politik); (4) massa dimobilisasi; (5) pemerintah melakukan tindakan represif untuk mengendalikan oposisi. Kemunculannya Ketika negara melaksanakan pembangunan transisi dari tahap industrialisasi substitusi impor ke industrialisasi berat. Untuk itu negara membutuhkan pasokan modal dan teknologi yang jauh lebih besar dari pada yang ada dalam negeri, sehingga negara terpaksa bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional. Dalam kerja sama tersebut pemerintah harus mampu memberikan persyaratan ekonomi politik. Persyaratan ini menyebabkan dterapkannya kebijakan ekonomi untuk meperlancar program pembangunan ekonomi berorientasi ke luar. Dampak kebiajakan ini hancurnya pengusaha nasional bermodal kecil, kelompok oposisi, tumbuh berbagai krisis. Negara menganganti krisis ini membuat aturan main yang bersifat otoriter birokratik dan teknokratik.

Krasner (1978: 10 & 331)) teori negara dan kepentingan nasional. Dasar pemikirannya negara ada jika kepentingan nasional ada. Negara adalah institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok masyarakat. Negara akan menentukan apa yang menjadi kepentingan nasional dari sebuah masyarakat dan kemampuan untuk mendefenisikan serta mempertahankan kepentingan nasional itu. Kepentingan nasional mencakup: (1) memaksimalkan struktur persaingan dalam industri; (2) menurunkan harga; (3) meningkatkan jaminan bagi ketersediaan pasokan; (4) menjamin adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri.

Skocpol (1979) menjelaskan tentang kepentingan negara. Makna negara adalah organisasi yang menjalankan fungsi administrasi, kepolisian dan militer dan dikoordinasikan oleh sebuah badan eksekutif. Negara merupakan sebuah struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri, tidak sepenuhnya sama dan tidak sepenuhnya dapat digabungkan dengan kepentingan kelas-kelas dominan atau dengan semua kelompok yang ada dalam wilayah politik.Negara dapat mempengaruhi kebijakan dalam dua level: (1) level minimum, negara akan melakukan perubahan terhadap inisiatif-inisiatif dan menterjemahkan inisiatif itu menjadi kebijakan; (2) level maksimum negara melakukan tansformasi (merubah bentuk) terhadap tuntutan-tuntutan kepentingan masyarakat. Negara bisa mempengaruhi agenda dari kelompok-kelompok masyarakat dan struktur negara ikut berperan dalam memunculkan tututan-tuntutan masyarakat yang berusaha dicapai lewat bidang politik.

Nordlinger (1981;11) konsepnya otonomi negara dan demokrasi, menjelaskan pengertian negara mengacu pada semua individu yang memegang jabatan memeberikan kewenangan kepada individu-indvidu itu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat Sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen masyarakat. Kemampuan para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka berdasarkan pilihan-pilihan konstituen mereka yakni rakyat pemilih yang mereka wakili dengan cara menterjemahkan pilihan-pilihan itu ke dalam kebijakan publik, yang bisa selaras atau bisa bertentangan dengan pilihan-pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara. Pilihan kebijakan individu pejabat negara dengan pilihan individu bukan pejabat negara kadangkala mengalami konflik. Ketika pilihan individu pejabat negara menang, maka dikatakan negara memiliki otonomi, karena individu pejabat negara berhasil menterjemahkan pilihan mereka menjadi kebijakan publik

Skocpol (1985; 3-37) dengan teorinya negara sebagai arena konflik. Substansi teorinya, negara sebagai arena konflik sosial dan ekonomi menggunakan sarana yang berbeda seperti paksaaan atau slogan-slogan yang mendengungkan kebijakan umum. Peran negara: (1) menjadi aktor utama dan seringkali menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik; (2) fungsi dasar dari semua negara adalah untuk memelihara hukum dan ketertiban, dan membangun kapital untuk dirinya sendiri; (3) apartur negara mendapat tempat yang menguntungkan dalam fenomena ekonomi, sosial dan politik.

Caporaso, & Levine. (1992) menjelaskan teorinya otonomi negara (*state autonomy*). Makna negara menurut mereka adalah : (1) negara merupakan aktor ikut bersaing memperebutkan sumber daya; (2) negara memiliki kemiripan dengan kelompok kepentingan dari beberapa aspek; (3) negara memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan dirinya; (4) peran negara adalah menetapkan landasan ideal (ideologi) dari tatanan sosial. Pengertian Otonomi negara: kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari faktor-faktor siasial dan faktor ekonomi. Faktor masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tindakan-tindakan yang diambil negara. Konsekwensi (*Corrollary*): (1) negara dikatakan otonom apabila mampu menang melawan tekanan dari masyarakat sipil, akibatnya terjadi pertarungan politik dimana pemimpin negara berusaha membendung tekanan dari masyarakat dan berusaha menerjemahkan kepentingan mereka ke dalam kebijakan publik; (2)tindakan negara tidak dipengaruhi oleh kelompok manapun atau koalisi antar kelompok; (3) negara mampu menghadapi tekanan dari luar. Implikasi: (1) negara kuat adalah negara yang mampu menolak tekanan dan menghasilkan inisiatif kebijakan publik sendiri; (2) negara lemah adalah negara yang tuduk pada tekanan-tekanan dari kepentingan-kepentingan ekonomi.

Harvey (2007; 64) mengulas teorinya negara neoliberalisme (*neoliberalism state*) Asumsi dasarnnya adalah gerakan kapital tidak boleh dihambat dan semua kekuatan yang menghalanginya harus disingkirkan. Penghapusan kemiskinan dalam negeri dan seluruh dunia bisa dicapai melalui pasar bebas dan perdagangan bebas.Negara neoliberal lebih mementingkan hak-hak pribadi individu, aturan hukum, institusi pasar bebas, perdagangan bebas. Negara harus menggunakan monopoli sarana kekerasan yang dimiliki untuk melindungi kalangan bisnis dan koorporasi untuk beroperasi dalam rangka institusi pasar dan perdagangan bebas dan pasar bebas. Privatisasi aset-aset menjadi sebuah kebijakan yang penting. Ketiadaan hak-hak milik pribadi yang tegas justru menjadi penghalang institusional besar bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kemakmuran. Kebebasan kapital untuk bergerak antar sektor merupakan hal yang penting. Semua penghalang terhadap gerak kebebasan kapital berupa tarif, pajak, kontrol perencanaan dan lingkungan harus ditiadakan. Negara neoliberal (*neoliberal state*) menyukai pemerintahan yang dijalankan para elite dan keputusan pengadilan, dari pada pemerintahan berbasis proses pengambilan keputusan demokratis. Karena demokrasi hanya bisa dicapai bila diimbangi kehadiran kelas menengah yang kuat sehingga stabilitas politik dapat terjamin.

Bremmer (2010; 43-85) menjelaskan tentang apa yang disebutnya negara (*state capitalism*). Penjelasnnya diawali dengan membedakan pasar yang disebutnya spektrum. Menurutnya, spektrum pasar terbagi dua, pertama kapitalisme negara (*state capitalism*) atau ekonomi terpimpin, ide dasarnya negara mengendalikan perekonomian. Kapitalisme negara berasal dari ideologi komunisme. Kedua kapitalisme pasar bebas (*free market capitalisme*) ekonomi pasar bebas (*free market economic*), ide dasarnya masyarakat mengendalikan perekonomian. kapitalisme pasar bebas berasal ideologi liberalisme murni. Ciri kapitalisme negara: (1) para pembuat kebijakan tidak menerapkan kapitalisme negara sebagai sebuah langkah sementara yang dimaksudkan untuk membangun kembali perekonomian yang terkoyak-koyak atau untuk mendorong perekonomian keluar dari resesi; (2) merangkul kapitalisme untuk tujuan sendiri; (3) mengendalikan perusahaan swasta yang unggul.

1. **Pendekatan Negara: Tinjauan Studi di Indonesia**

Robison (1986) menjelaskan tentang katagori kapitalis Indonesia. Menurutnya pemerintah memainkan peran sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan kapitalisme Indonesia pascakolonial. Pengaruhnya bersifat menentukan, bukan saja dalam memberikan kondisi politik bagi pertumbuhan kaum kapitalis tetapi juga menyediakan kerangka fiskal dan investasi kapital yang besar. Katagori kapitalis yang berkembang di Indonesia yaitu: (1) kapitalis asing; (2) kapitalis domestik; (3) kapital korporasi negara; (4) kapitalis militer; (5) kapitalis Cina; (6) kapitalis pribumi.

Mas’oed (1989) dengan karyanya yang disebut negara otoriter birokratik korporatis (*corporatis buriaucratic authoritarian state*). Menurtnya,kemunculan negara model ini sebagai warisan orde lama struktur politik dominasi eksekutif, politik kepartaian yang sentrifugal (cerai-berai), legislatif lemah, lembaga kepresidenan kuat dan patrimonial, Angkatan Darat yang berpengaruh kuat dalam politik dan ekonomi, serta birokrasi yang terpusat. krisis politik dan ekonomi yang diwarisi rezim orde lama dan meledak pada tahun 1965-1966. Sifat model negara ini adalah, rezim Orde Baru dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga bekerjasama dengan para teknokrat sipil; Beberapa perusahaan besar yang mempunyai hubungan khusus dengan negara dan kapitalis internasional mendominasi perekonomian Indonesia. Ciri negara model negara ini yaitu: (1) pembuatan kebijaksanaan teknokratik-birokratik; (2) massa dimobilisasi; (3) tindakan-tindakan represif, untuk mengendalikan oposisi; (4) kantor kepresidenan yang otonom.

Budiman (1991) menjelaskan tentang konsep negara otoriter birokratik rente (*rentier* *buriaucratic* *authoritarian state)* dan negara otoriter birokratik pembangunan (*development buriaucratic* *authoritarian state)*. Negara otoriter birokratik rente, intinya negara membentuk borjuasi atau kapitalis, elite negara melalui birokrasinya memberi fasilitas-fasilitas bagi para pengusaha swasta dan pemimpin perusahaan negara. Para elite negara meminta imbalan, meminta rente atau ongkos sewa (*rent seeking*) sebagai jasa. Elite negara yang memiliki kekuasaan birokratis menyewakan jabatannya untuk kepentingan pengusaha (rentenir) (kapitalisme birokrat). Akibatnya dalam negara ini yang muncul adalah kelompok pengusaha yang tergantung kepada fasilitas dan perlindungan negara. Dalam negara seperti ini liberalisasi dan demokratisasi sulit terjadi, karena lemahnya kaum borjuasi. Indonesia termasuk katagori negara otoriter birokratik rente. Kemunculannya merupakan warisan pemerintahan sebelumnya melahirkan persaingan antara pengusaha Cina dengan pengusaha pribumi. Situasi ini dimanfaatkan oleh birokrat negara untuk memperkuat posisi politiknya. Kelompok pengusaha Cina dimanfaatkan untuk akumulasi modal sehingga dapat membayar sewa (*rente*) kepada pejabat negara. Kelompok bojuasi pribumi yang punya hubungan keluarga dengan pejabat negara, mereka merupakan perpanjangan bisnis pejabat negara.

Negara otoriter birokratik pembangunan dengan sifatnya, elite negara memiliki peran yang sangat menentukan membuat dirinya, atau memilih orang lain di luar negara untuk menjadi pemilik modal melakukan akumulasi modal. Kalau mereka pejabat negara yang mengelola perusahaan negara, mereka berhasil memberi keuntungan yang besar kepada perusahaan yang dikelolanya. Kalau mereka pengusaha swasta mereka mula-mula tergantung pada negara, karena mereka dibentuk melalui fasilitas yang diberikan negara. Lama-kelamaan mereka menjadi mandiri dan mampu menambah kekuatan ekonomi mereka. Pada gilirannya kelompok inilah yang mejadi kekuatan bagi terjadinya liberalisasi (makin berkurangnya campur tangan negara) dan demokratisasi yakni makin kuatnya lembaga-lembaga di luar negara, membuat negara tidak begitu saja mendikte kemauannya kepada masyarakat sipil. Negara membrantas kapitalis yang lemah yang dibentuk oleh hubungan erat dengan pejabat negara yang memberikan fasilitas dan perlindungan. Negara memberi kesempatan kepada pengusaha untuk tumbuh, pejabat negara yang tumbuh dengan sistem rente mulai dibrantas. Negara melakukan pembangunan dengan mengubah dirinya. Contoh Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-Hee.

Hadiz (2002) menjelaskan konsep negara kapitalis. Indonesia postSoeharto termasuk katagori negara model ini. Ciri negara model ini yaitu, pertama bidang politik, negara membangun model negara korporatis, negara mengatur kekuasaannya melalui aparat keamanan, birokrasi dan Golkar. Ketiga ketiga lembaga negara ini mengukuhkan kekuasaannya untuk mengendalikan politik dan ekonomi Indonesia. Bidang ekonomi, negara memperkokoh kekuasaanya melalui kepemilikan dan kontrol ekonomi. Negara mendominasi minyak, pertambangan, dan sektor sumber daya alam, infra struktur, perbankan dan perdagangan. Negara memperluas kontrolnya atas investasi, perdagangan dan perbankan asing. Salah satu kebijakan yang dijalankan negara adalah Pedagang yang ditunjuk (*approved trader*), yaitu suatu monopoli impor yang diberikan kepada perusahaan negara dan pengusaha swasta yang punya koneksi (keluarga bisnis-politik dan pengusaha klien) dengan negara. Implikasinya adalah Pembangunan kapitalis negara melalui negara otoriter dan predator memberi peluang berkembangnya oligarki kapitalis yang telah menyerobot kekuasaan negara untuk kepentingannya sendiri.

Aziz S.R (2014) hasil studnya menyebutkan negara Indonesia sebagai negara paragmatism (*the pragmatic state*). Negara lebih banyak hadir sebagai pelayan kaum kapitalis, negara sengaja membuat kebijakan pembangunan ekonomi yang memihak kepada kepentingan investor. Negara dengan sadar memperkuat ideologi pasar (*Sterengthening the market ideology*). ditandai dengan sikap dan ambisi negara menerapkan sistem ekonomi liberal-kapitalistik semata, dan mengabaikan ideologi ekonomi yang diamanatkan konstitusi. Kalkulasi ekonomi yang dilakukan negara lebih bertumpu pada kepentingan-kepentingan yang dipandangnya mendesak dan memberikan nilai guna secepat mungkin. Negara cenderung mengutamakan kepentingan pasar modern dalam kebijakan investasi. Kehadiran *civil society* yang kuat tidak diperlukan.

**D. Penutup**

Pendekatan negara dalam studi ekonomi politik pada dasarnya memandang negara memiliki kepentingannya sendiri yakni untuk memperkuat basis kekuasaan melalui kontrol terhadap sumber daya politik dan sumber-sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi terutama bekerjasama dan melindungi kelompok kapitalis untuk meraih anggaran dalam rangka memperkuat kekuasaannya. Kepentingan negara dalam ekonomi dapat dipelajari melalui kebijakan-kebijakan negara.

Hasil Studi pendekatan negara di Indonesia dalam memahami fenomena politik dan ekonomi masa pemerintahan Orde Baru, negara memainkan peran dominan memperbesar kapitalisme di Indonesia. Pemerintah berkoalisi dengan kelompok kapitalisme dalam negeri dan internasional. Peran negara masih berlanjut postOrde Baru. Negara memainkan peran dalam memperkuat poisi para kapitalis melalui berbagai kebijakannya, sebaliknya negara memperoleh imbalan anggaran untuk biaya politik.

Studi pendekatan negara terutama bagaimana negara berkolaborasi dengan kapitalis baik pada level pemerntahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam proses pembangunan dapat dikembangkan untuk penelitian ekonomi politik pendekatan negara di Indonesia. Level pemerintahan pusat, isu-isu yang dapat dikembangkan bagaimana negara dan kapitalis asing berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur. Pada level pemeritahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, bagaimana para kepala daerah berkolaborasi dengan para kapitalis dalam meraih posisi kepala daerah dan pembangunan daerah.

Para ilmuwan telah memberikan sumbangan dan karyanya tentang teori ekonomi politik dengan pendekatan negara. Teori- teori ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menganalisis fenomena ekonomi politik dengan menjelaskan berbagai model keterlibatan negara dalam aspek ekonomi suatu negara. Teori-teori tersebut bisa relevan, bisa sebagian relevan, atau bisa juga tidak memiliki relevansi.

**Daftar Pusataka**

Aziz S.R., Abdul (2014). *Hubungan Negara dan Korporasi dalam Persaingan Pasar Modern (Perspektif Ekonomi Politik ata monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010*), Disertasi FISIP-UI.

Bremmer, Ian (2010; 43-85). *The End of the Free Market Who Wins the War Beetween States and Corporations*, New York: Penguin Inc.

Budiman, Arief (1991). *Negara dan pembangunan Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, Jakarta: Yayasan Padi dan kapas.

Caporaso, James A. & Levine, David P. (1992). *Theories of Political Economy*, Cambridge, Cambridge university Press.

Connolly, William E. (1969). *The Bias of Pluralism*, New York: Atherton Press.

Guillermo O,Donnell (1973; 76-83). *Modernization and Bureaucratic Authoritarianisme: Studies in South American Politics*, Berkeley: University of California Institute of International Studies.

Hadiz, Vedi R. (2002). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES.

Harvey, David (2007; 64). *A Brief History of Neoliberalism, O*xford: University Press

Krasner, Stephen D. (1978). *Defending the National Interest*, Princeton, N.J, Princeton University Press.

Mas’oed, Mohtar (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru* 1966-1971, Jakarta: LP3ES.

Rauf, Maswadi (1996; 77) “Pendekatan Negara (*Statist Approach*) dalam Ilmu Politik”, dalam Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (ed), *Teori-Teori Politik Dewasa ini*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Robison, Richard (1986). *Indonesian*: *Rise of Capital*, New South Wales: Allen & Unwin Pty Ltd.

Skocpol, Theda (1979). *State an Sosial Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.

-----------(1985; 3-37). *Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research*”, dalam Peter B. Evan, Dietrich Rueschemeyer, & Theda Skocpol (eds*), Bringing the State Back In*, Cambridge: Cambridge Unversity Press.